

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Manajemen

A. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah seni, yaitu pengetahuan bagaimana mewujudkan hasil yang diharapkan. Manajemen menjelaskan gejala dan peristiwa, mensistemkan hubungan variabel dengan batasan-batasan pasti, mendasari prinsip-prinsip yang telah ditemukan.¹¹

Manajemen disebut seni dan ilmu, sebab dengan ilmu dan pengetahuan itu dapat dikembangkan seni bagaimana mencapainya. Manajemen adalah ilmu pengetahuan sosial berbeda dengan ilmu fisika yang bersifat pasti.¹²

Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan suatu organisasi dengan cara bekerja dalam team.¹³

B. Fungsi Manajemen

Menurut George R. Terry, mendefinisikan manajemen dalam bukunya *Principles of Management* yaitu “suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupu seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁴

Dari defenisi itulah kita bisa melihat fungsi manajemen menurutnya. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi manajemen menurut Terry :

¹¹ Dr. Laurence Manullang, Teori Manajemen Komprehensif Integralistik (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 1

¹² *Ibid*, hlm 2

¹³ <http://rocketmanajemen.com/pengertian-manajemen/> (diakses pada tanggal 14 februari 2018)

¹⁴ <http://studimanajemen.blogspot.co.id/2012/08/fungsi-manajemen-menurut-george-terry.html?m=1> (diakses pada tanggal 2 Maret 2018)

Berikut penjabaran ringkas mengenai empat fungsi manajemen, yaitu :

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagia kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan.

4. Pengawasan (*controlling*)

Mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.¹⁵

C. Prinsip-prinsip Manajemen

Menurut Henry Fayol yang mengemukakan 14 prinsip manajemen¹⁶ antara lain :

¹⁵<http://studimanajemen.blogspot.co.id/2012/08/fungsi-manajemen-menurut-george-terry.html?m=1>(diakses pada tanggal 25 Desember 2017)

¹⁶<http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-manajemen-fungsi-prinsip.html?m=1>
(diakses pada tanggal 14 Februari 2018)

1. Pembagian Kerja

Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja akan berjalan efektif. Oleh karena itu, pembagian kerja harus didasarkan dari prinsip *the right man in the right place* dan bukan atas dasar *like and dislike*. Pembagian kerja ini akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja seseorang dalam suatu organisasi/instansi/perusahaan.

2. Wewenang dan Tanggung Jawab (*Authority and Responsibility*)

Wewenang mencakup hak untuk member perintah dan dipatuhi, biasanya dari atasan ke bawahan. Wewenang ini harus diikuti dengan pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan perintah.

3. Disiplin (*Dicipline*)

Disiplin mencakup mengenai rasa hormat dan taat kepada peranan dan tujuan organisasi.

4. Kesatuan Perintah (*Unity of Command*)

Setiap karyawan hanya menerima intruksi tentang kegiatan tertentu hanya dari satu alasan.

5. Kesatuan Arah (*Art of Direction*)

Dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, karyawan harus diarahkan oleh seorang manajer dengan penggunaan satu rencana.

6. Meletakkan Kepentingan Organisasi dari pada Kepentingan Sendiri (*Sub Ordination of Individual Interest to General Interest*)

7. Balas Jasa/Pemberian Upah (*Remuneration*)

Kompensasi untuk pekerjaan yang dilakukan haruslah adil, baik bagi karyawan maupun dengan pemilik.

8. Sentralisasi/Pemusatan (*Centralization*)

Dalam pengambilan keputusan harus ada keseimbangan yang tepat antara sentralisasi desentralisasi

9. Hierarki

Adanya hierarki akan menentukan batas kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing karyawan dalam perusahaan. Dengan adanya hierarki, setiap karyawan akan mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan dari siapa ia mendapat perintah.

10. Ketertiban (*Order*)

Ketertiban dalam melaksanakan pekerjaan merupakan syarat utama mencapai bagi kelangsungan dan kenyamanan orang bekerja dalam perusahaan.

11. Keadilan dan Kejujuran (*Equity*)

Keadilan dan kejujuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, harus ada perlakuan yang sama dalam sebuah organisasi.

12. Stabilitas Kondisi Karyawan

Kestabilan karyawan harus dijaga sebaik-baiknya agar segala pekerjaan berjalan lancar. Kestabilan dapat terwujud karena adanya disiplin kerja yang baik dan adanya ketertiban dalam kegiatan.

13. Inisiatif (*Initiative*)

Bawahan harus diberi kebebasan untuk menjalankan dan menyelesaikan rencana pekerjaan meskipun beberapa kesalahan mungkin terjadi.

14. Semangat Kesatuan, Semangat Korps

Setiap karyawan harus memiliki rasa kesatuan, yaitu rasa senasip dan sepanggungan sehingga menimbulkan semangat kerja sama yang baik. Manajer yang baik akan mampu melahirkan semangat kesatuan (*esprit de corps*) sehingga karyawan akan memiliki kebanggaan, kesetiaan, dan rasa memiliki fungsi terhadap perusahaan.

2. Humas

A. Pengertian Humas

Istilah “hubungan masyarakat” yang disingkat dengan “humas” sebagai terjemahan dari istilah *public relations*, di Indonesia sudah benar-benar memasyarakat dalam arti kata telah dipergunakan secara luas oleh departemen, jawatan, perusahaan, badan, lembaga, dan lain-lain organisasi kekaryaan.¹⁷

Diterjamahkannya *public relations* yang merupakan metode komunikasi dan objek studi ilmu komunikasi itu menjadi hubungan masyarakat, ditinjau dari ilmu komunikasi sebenarnya kurang tepat. Perkataan *public* dari istilah *public relations* bukanlah masyarakat dalam pengertian *society*, yakni keseluruhan manusia yang menghuni suatu wilayah. Pengertian *public* dalam *public relations* adalah sekelompok orang yang mempunyai kaitan kepentingan dengan suatu organisasi.¹⁸

Jika hubungan masyarakat memang terjemahan dari *public relations*, maka cirri-ciri hakiki *public relations* harus ada pada hubungan masyarakat dan dilaksanakan oleh kepala humas beserta stafnya. Adapun ciri-cirinya¹⁹ adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi yang dilancarkan berlangsung dua arah secara timbal balik.
2. Kegiatan yang dilakukan terdiri atas penyebaran informasi, penggiatan persuasi, dan pengkajian pendapat umum.
3. Tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan organisasi tempat humas menginduk.
4. Sasaran yang dituju adalah khalayak di dalam organisasi dan khalayak di luar organisasi.
5. Efek yang diharapkan adalah terbinanya hubungan yang harmonis antara organisasi dan khalayak.

¹⁷ Onong Ujana Effendy, Ilmu Komunikasi - Teori dan Praktek, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 131

¹⁸ *Ibid*, hlm 131

¹⁹ *Ibid*, hlm 132

Sebagaimana telah dikemukakan, ada sejumlah mengenai definisi mengenai humas. *Webster's New World Dictionary* mendefinisikannya sebagai “ Hubungan dengan masyarakat luas, seperti melalui publisitas, khususnya fungsi-fungsi koperasi, organisasi, dan sebagainya yang berhubungan dengan usaha untuk menciptakan opini publik dan citra yang menyenangkan untuk dirinya sendiri”.

Definisi yang lebih spesifik yang menekankan tanggung jawab khususnya, diberikan oleh *Public Relations News*: “ Humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prosedur-prosedur seorang individu atau sebuah organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik.

Definisi berikutnya, Humas adalah suatu filsafat sosial dan manajemen yang dinyatakan dalam kebijaksanaan beserta pelaksanaannya, yang melalui interpretasi yang peka mengenai peristiwa-peristiwa berdasarkan pada komunikasi dua arah dengan publiknya, berusaha untuk memperoleh saling pengertian dan itikad baik.²⁰

B. Fungsi Humas

Fungsi humas²¹ terbagi dalam 2 bagian, yaitu :

1. Fungsi konstruktif

Membangun kondisi atau mempersiapkan “mental publik” untuk menerima kebijakan lembaga, penerangan/penyebaran informasi, evaluasi perilaku publik untuk direkomendasikan kepada manajemen, menyiapkan prakondisi untuk saling pengertian, percaya dan saling membantu terhadap tujuan-tujuan publik atau organisasi atau mempertemukan kepentingan lembaga dengan kepentingan publik.

2. Fungsi korektif

²⁰ H. Frazier Moore. *Humas : Membangun Citra Dengan Komunikasi*, (Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2005), 6

²¹ <http://www.komunikasipraktis.com/2015/04/tugas-pokok-fungsi-tupoksi-humas.html?l> (diakses pada tanggal 3 Maret 2018)

Berperan sebagai “pemadam kebakaran”, yakni mengoreksi informasi dan persepsi publik yang tidak tepat tentang lembaga, termasuk meluruskan pemberitaan negative dan menyampaikan “hak jawab”, termasuk mengevaluasi program lembaga, khususnya yang berkaitan dengan publik.

C. Tugas Utama Humas

Bagian penting dari pekerjaan petugas humas dalam suatu organisasi adalah²² :

1. Membangun kesan (*image*) – kesan baik, citra positif
2. Pengetahuan dan pengertian – informasi, penerangan, penjelasan.
3. Menciptakan ketertarikan
4. Penerimaan – pengertian, pemahaman.
5. Membangun/menciptakan simpati publik.

Contoh kegiatan humas adalah melobi, berbicara di depan publik atau melakukan pembicaraan publik (*public speaking*), menyelenggarakan acara, dan membuat pernyataan tertulis seperti rilis berita.

D. Tujuan Humas²³

Berikut ini adalah tujuan Hubungan Masyarakat (Humas), diantaranya:

1. Meningkatkan partisipasi, dukungan dan bantuan secara konkret dari masyarakat baik itu berupa tenaga, sarana prasarana ataupun dana demi kelancaran dan tercapainya tujuan organisasi.
2. Merangsang dan membangkitkan rasa tanggung jawab yang lebih besar pada masyarakat terhadap kelangsungan program organisasi tersebut secara efektif dan efisien.
3. Mengikutsertakan masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

²²*Ibid* (diakses pada tanggal 3 Maret 2018)

²³<https://www.sekolahpendidikan.com/2017/09/pengertian-tujuan-fungsi-tugas-prinsip.html#> (diakses pada tanggal 16 April 2018)

4. Menegakkan dan mengembangkan citra yang menguntungkan bagi organisasi terhadap para stakeholdernya dengan sasaran yang terkait yakni publik internal dan publik eksternal.
5. Membuka kesempatan lebih luas pada para pengguna produk/lulusan dan pihak yang terkait untuk partisipasi dalam meningkatkan mutu organisasi.

3. Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

1. Pengertian *good governance*

Sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara merupakan unsur penting dalam suatu Negara. Oleh karena itu, maka tidak berlebihan apabila salah satu faktor penentu krisis nasional dan berbagai persoalan yang melanda bangsa Indonesia bersumber dari kelemahan di bidang manajemen pemerintahan, terutama birokrasi, yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Memasuki era reformasi, hal tersebut diakui, sehingga melalui TAP MPR RI No.XI/MPR/1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN. Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Bangsa Indonesia menegaskan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.²⁴

Jika kita melihat bagian-bagian dari partisipasi yang dapat dilakukan oleh publik atau masyarakat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi publik dalam pengambilan suatu keputusan sangatlah penting. Partisipasi publik menjadi sangat penting urgensinya dalam proses pengambilan keputusan setelah

²⁴ Nugraha, Nanang. Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintah Daerah (Bandung : PT. Refika Aditama, 2013), 11

dikampanyakannya *good governance* oleh Bank Dunia maupun United Nations Development Program (UNDP).²⁵

2. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*.

Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip *good governance* diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini²⁶ :

1. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.

²⁵*Ibid*, 11

²⁶<https://yanwariyanidwi.wordpress.com/2015/12/15/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia/> (diakses pada tanggal 26 Maret 2018)

2. Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita *good governance*, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan *rule of law* dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (*the supremacy of law*), Kepastian hukum (*legal certainty*), Hukum yang responsip, Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, Independensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks praktek lapangan dunia usaha, pihak korporasi mempunyai tanggungjawab moral untuk mendukung bagaimana *good governance* dapat berjalan dengan baik di masing-masing lembaganya. Pelaksanaan *good governance* secara benar dan konsisten bagi dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh setiap lembaga korporasi yang ada didunia. Dalam lingkup tertentu etika bisnis berperan sebagai elemen mendasar dari konsep CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dimiliki oleh perusahaan. Pihak perusahaan mempunyai kewajiban sebagai bagian masyarakat yang lebih luas untuk memberikan kontribusinya. Praktek *good governance* menjadi kemudian *guidence* atau panduan untuk operasional perusahaan, baik yang dilakukan dalam kegiatan internal maupun eksternal perusahaan. Internal berkaitan dengan operasional perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut bekerja, sedangkan eksternal lebih kepada bagaimana perusahaan tersebut bekerja dengan stakeholder lainnya, termasuk didalamnya publik.

5. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus*)

Menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsesus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa (*coercive power*) bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan,

karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

6. Kesetaraan (*Equity*)

Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, *leaflet*, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi

7. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi

kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna. Kriteria efektif biasanya di ukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintahan itu efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan disusun secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang rasional tersebut, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

B. Kajian Terdahulu

Sebagai pedoman maupun petunjuk dalam melakukan penelitian ini penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang jika dilihat dari segi isi maupun judul memang tidak begitu ada persamaan tetapi penulis melihat ada suatu keterkaitan antara permasalahan terdahulu seperti :

1. Judul Skripsi : Manajemen Humas Polresta Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Dampak Geng Motor Di Pekanbaru.
Nama : Reyzha Ryanda
Tahun : 2015
Jenis Pustaka : Skripsi

Penelitian ini berisi bahwa Humas Polresta Pekanbaru telah melakukan perannya sesuai dengan fungsinya. Manajemen Humas Polresta Pekanbaru di bagi dengan 4 tahap yakni perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Sosialisasi yang telah dilakukan yaitu langsung ke sekolah-sekolah, bekerja sama dengan pihak sekolah dan wali murid, sosialisasi ke bengkel, toko aksesoris, radio, dan bekerja sama dengan pihak terkait serta melakukan patrol langsung ke daerah rawan geng motor.²⁷

²⁷ Reyzha Ryanda (2015) Manajemen Humas Polresta Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Dampak Geng Motor Di Pekanbaru

2. Judul Skripsi : Manajemen Humas Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menyebarluaskan Informasi Pembangunan Kepada Masyarakat.

Nama : Mislaili

Tahun : 2017

Jenis Pustaka : Skripsi

Manajemen Humas Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat adalah dalam perencanaan humas melakukan pendekatan dengan media massa, menyediakan anggaran, melengkapi fasilitas, dalam tahap pengorganisasian humas membagi tugas sesuai dengan tugas pokok masing-masing bagian humas, dalam tahap penggerakkan humas melakukan publikasi, sosialisasi, dan bekerja sama dengan beberapa pihak yang terkait dengan penyebaran informasi pembangunan, dan tahap pengevaluasian humas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat.²⁸

3. Judul Skripsi : Manajemen Humas Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Sosialisasi Program 5 Pilar Pembangunan Di Kabupaten Kampar.

Nama : Irfandi Phido

Tahun : 2015

Jenis Pustaka : Skripsi

Dari penelitian ini, data dan hasil wawancara yang telah penulis lakukan adalah manajemen humas pemerintah Kabupaten Kampar dalam sosialisasi program 5 pilar pembangunan di Kabupaten Kampar sudah sepenuhnya menjalankan empat fungsi pokok manajemen humas dengan

²⁸ Mislaili (2017) Manajemen Humas Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menyebarluaskan Informasi Pembangunan Kepada Masyarakat.

baik antara lain perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.²⁹

4. Judul : Pengembangan Strategi Pemasaran Dan Manajemen Hubungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Peminat Layanan Pendidikan.

Nama : Rudy Haryanto dan Sylvia Rozza

Tahun : 2012

Jenis Pustaka : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol II, No. 1

Berdasarkan hasil survey dan wawancara yang dilakukan pada unit humas maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Humas telah memiliki matriks kompetensi untuk petugasnya
- b. Humas telah memiliki matriks tugas dan wewenang
- c. Humas telah memiliki sasaran mutu yang tertuang dalam dokumentasi yang harus dilaksanakan sesuai periode berlakunya.³⁰

5. Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan *Cyber Public Relations* Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pemerintah Kota Payakumbuh.

Nama : Beni Erliansyah

Tahun : 2017

Jenis Pustaka : Skripsi

Didalam proses manajemen proses perencanaan dilakukan sebelum suatu kegiatan itu dijalankan. Perencanaan merupakan otak dari sebuah kegiatan yang akan dijalankan, karena didalam proses perencanaan semua pemikiran ditujukan untuk membahas proses pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir suatu kegiatan tersebut yang sering disebut dengan evaluasi kegiatan. Perencanaan program meliputi segala sesuatu yang akan membantu dalam proses tercapainya target sasaran yang ingin dicapai dan

²⁹ Irfandi Phido (2015) Manajemen Humas Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Sosialisasi Program 5 Pilar Pembangunan Di Kabupaten Kampar.

³⁰ Rudy Haryanto dan Sylvia Rozza, "Pengembangan Strategi Pemasaran Dan Manajemen Hubungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Peminat Layanan Pendidikan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol II, No. 1*,(Juni 2102), 27-34

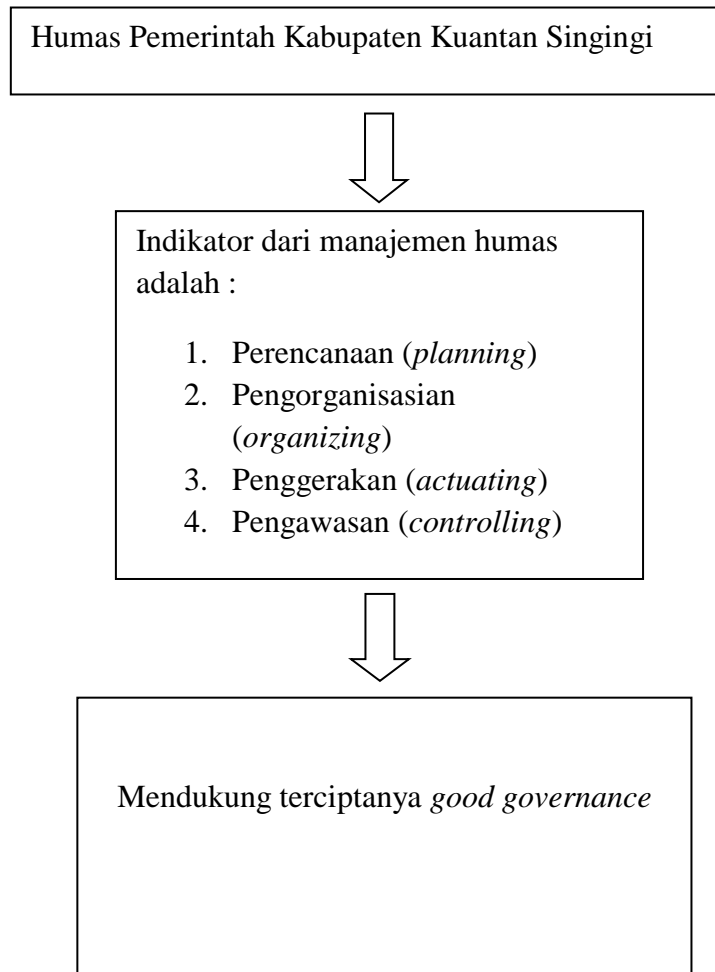
juga mengurangi resiko yang akan terjadi yang bisa mengakibatkan terhambatnya proses kegiatan tersebut dalam mencapai target sasarannya.³¹

C. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini penulis mengkonsepkan kerangka berpikir sehingga dapat memberikan kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini, terutama menjadi seorang praktisi *public relations* tentunya dituntut untuk menjalankan peran dan fungsinya dalam menyebarkan informasi serta mensosialisasikan program yang telah direncanakan bisalancar dan berhasil dan tepat sasaran. Dalam penelitian ini penulis mengambil tema Manajemen Humas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singing Dalam Mendukung Terciptanya *Good Governance*

³¹ Beni Erliansyah (2017) Manajemen Pengelolaan *Cyber Public Relations* Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pemerintah Kota Payakumbuh

Adapun gambaran kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.1.Kerangka Pikir